

■ Edisi 3. Agustus 2024

HILIRISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK KESEJAHTERAAN NELAYAN

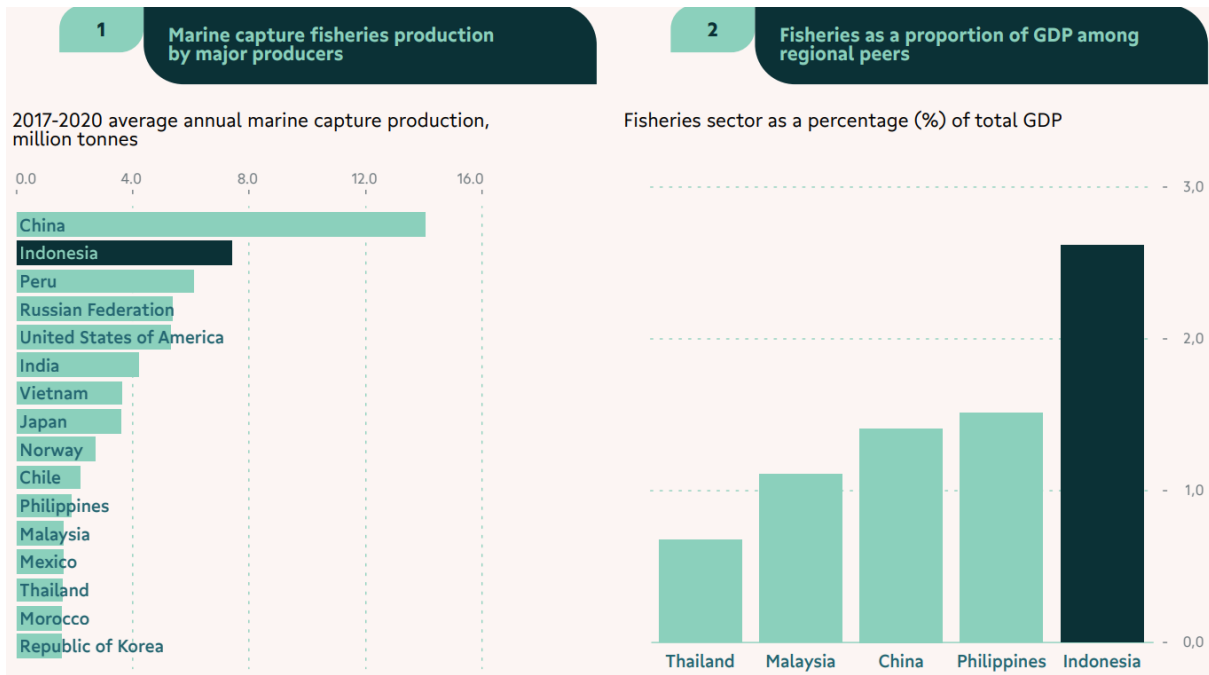
RINGKASAN EKSEKUTIF:

- Sektor perikanan Indonesia sering disebut sebagai pendorong utama ekonomi biru, karena kontribusi pentingnya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Posisinya yang strategis serta daya ungkitnya yang besar dapat dilihat dari efektivitasnya dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ekspor hasil laut, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Namun demikian, potensi besar ini dapat dikatakan belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam perencanaan pembangunan nasional, dan pengembangan industri hilir perikanan yang menghadapi tantangan signifikan, terutama disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Hilirisasi perikanan dan kelautan merupakan dua sektor utama dari kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo. Namun, yang lebih sering terdengar oleh publik adalah hilirisasi di sektor pertambangan dan mineral, seperti: Nikel, timah, batu bara, dll.
- Implementasi hilirisasi perikanan dan kelautan dilakukan secara konsisten dan bersifat inklusif, berperspektif pemberdayaan, dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah produk perikanan dan kelautan skala mikro dan kecil agar memiliki kemampuan dalam implementasi hilirisasi industri perikanan.

PENDAHULUAN

Potensi Perikanan Indonesia

Sektor perikanan Indonesia sering disebut sebagai pendorong utama ekonomi biru, karena kontribusi pentingnya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Posisinya yang strategis serta daya ungkitnya yang besar dapat dilihat dari efektivitasnya dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ekspor hasil laut, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada 2022, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari USD35,7 miliar terhadap perekonomian nasional, atau sekitar 2,54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan beberapa negara lain (Thailand, Malaysia, China, dan Philipina). Pada tahun yang sama, sektor perikanan Indonesia juga menyumbang pendapatan ekspor senilai lebih dari USD6,24 miliar dan memasok sekitar 3% pasar global untuk makanan laut yang diekspor (KKP, 2024 a).



Gambar 1. Data Statistik Produksi Perikanan, PDB, dan Pendapatan Ekspor

Sumber: Toward Higer Performing Fisheries, 2024

Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya laut, di antaranya megabiodiversitas yang mencapai 8.500 spesies biota laut. Potensi tangkapan lestari mencapai 12,01 juta ton per tahun. Potensi produksi perikanan budidaya laut mencapai lebih dari 50 juta ton. Empat puluh lima persen barang dalam rantai perdagangan dunia juga diangkut melalui wilayah laut Indonesia. Penting untuk diketahui juga 115.000 km kabel bawah laut untuk mendukung digitalisasi nasional global. Terakhir, sektor perikanan dan kelautan menyimpan 188 juta ton CO₂eq potensi karbon biru dan energi terbarukan (Treggono, 2023).

Ikan sebagai komoditas strategis dalam komoditi pangan, berperan dalam ketahanan pangan, ketahanan negara, sumber gizi, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Ikan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya, dapat diterima semua agama, potensi produksi sangat besar, dan secara ekonomi kandungan lokal sangat tinggi. Keragaman jenis yang sangat tinggi serta tersedia sepanjang tahun, membuat komoditas ini diperhitungkan sebagai komoditi perdagangan (ekonomi). Komoditas ikan memiliki peranan sebagai komoditi ekspor penghasil devisa negara.

Namun demikian, potensi besar ini dapat dikatakan belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam perencanaan pembangunan nasional. Sejumlah tantangan besar melintang dan banyak di antaranya merupakan problem klasik, baik di level makro hingga mikro. Salah satu tantangan besar adalah masih rendahnya kesejahteraan nelayan. Fakta-fakta statistik maupun pengamatan di lapangan menunjukkan, proporsi penduduk miskin, termasuk kemiskinan ekstrem yang berasal dari keluarga nelayan masih sangat tinggi (BPS, 2021). Kehidupan nelayan yang miskin disebabkan karena penghasilan yang tidak menentu, kondisi iklim yang semakin ganas sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan kematian. Rendahnya kesejahteraan juga membatasi akses nelayan dan keluarganya terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengembangan industri hilir perikanan juga masih menghadapi tantangan signifikan, terutama disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Akses yang terbatas pada peningkatan keterampilan, permodalan, teknologi, insentif fiskal, serta investasi yang masih terbatas. Padahal, jika hal ini mendapat perhatian, peluang pengembangan sektor perikanan untuk memajukan perekonomian bangsa sangat besar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan positioning dan value sektor perikanan adalah dengan melakukan hilirisasi.

TEMUAN ANALISIS
Urgensi Hilirisasi Perikanan

Hilirisasi perikanan adalah proses pengolahan sumber daya alam perikanan dari bahan baku menjadi produk yang dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual dari suatu produk. Produk perikanan bisa diolah menjadi ikan fillet, tepung ikan,

susu ikan, ekstrak ikan, bubuk konsentrat protein ikan, dll. Hilirisasi perikanan dan kelautan merupakan dua sektor utama dari kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo. Namun, yang lebih sering terdengar oleh publik adalah hilirisasi di sektor pertambangan dan mineral, seperti: Nikel, timah, batu bara, dll. Kebijakan hilirisasi seharusnya tidak hanya terfokus pada hilirisasi pertambangan tetapi juga kepada perikanan dan kelautan. Pilihan kebijakan yang rasional, mengingat bahwa negara Indonesia memiliki sumber daya yang besar sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas perairan 6,4 juta km² (KKP, 2024 b).

Data KKP (2024) menunjukkan, volume produksi perikanan Indonesia sebesar 24.73 Juta ton, sedangkan pada Triwulan-I (2024) sebesar 5 juta ton. Jumlah unit pengelola ikan (UPI) ber HACCP: 1085 unit. Jumlah UPI keseluruhan 62.000, jumlah kapal 800-900 ribu kapal, jumlah tambak 1jt tambak (KKP, 2023). Tingginya posisi Indonesia sebagai penghasil perikanan, belum cukup untuk mendorong fokus kegiatan hilirisasi di sektor ini. Investasi pada sektor perikanan tergolong cukup rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, total realisasi investasi pada sektor perikanan pada 2022 sebesar Rp1,67 T, dengan rincian investasi dari luar negeri sebesar 0,5 T, dan investasi dari dalam negeri sebesar 1,2 T. Nilai investasi penanaman modal dalam negeri untuk sektor perikanan berada pada urutan ke-22 dari 23 sektor, sedangkan investasi modal asing berada pada urutan paling bawah yaitu 23.

Pemerintah juga telah menyediakan insentif guna meningkatkan minat investor dalam industri perikanan, dari hilir hingga ke hulu, mulai dari tahap pembangunan hingga operasional. Salah satunya adalah dengan memberikan tax allowance, berupa keringanan pajak penghasilan (PPH) dari nilai investasi sebesar lima persen per tahun selama enam tahun. Pemberian investment allowance dalam bentuk pengurangan laba bersih sebesar 60 persen dari total investasi untuk enam tahun, atau 10 persen setiap tahunnya. Selain itu pemerintah juga memberikan perizinan yang lebih mudah untuk para investor melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang bisa menyederhanakan prosedur, meningkatkan efisiensi, dan transparansi (BI, 2023).

Pohon Industri Hilirisasi Produk Perikanan dan Kelautan

Kegiatan dan aktivitas penangkapan ikan telah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu baik secara tradisional maupun modern. Kegiatan ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam di laut, terutama perikanan. Artinya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan pada sektor perikanan tangkap masih berorientasi pada bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan sumber daya perikanan di laut untuk kepentingan masyarakat, domestik, atau ekspor, dan semuanya dilakukan masih dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku. Contohnya Ikan tuna yang diekspor dalam

bentuk bahan mentah ke Eropa.

Jika pemerintah menjadikan prioritas sektor perikanan dan kelautan potensi sumber daya perikanan yang luar biasa, terutama jenis-jenis ikan tertentu yang memiliki potensi pasar luar negeri yang besar, pemerintah tidak hanya berpikir bagaimana mengekspor bahan mentah. Tahapan lebih lanjut yaitu merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan dengan mengolah hasil perikanan tangkap menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang disebut sebagai hilirisasi perikanan.

Pemetaan pohon industri yang ada pada pada sektor perikanan dan kelautan perlu dilakukan untuk menentukan prioritas pengembangannya. Pohon industri dapat memetakan kebutuhan akselerasi proses hilirisasi secara lebih sistematis dan terukur. Pemetaan pohon industri yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada udang misalnya, fokus pada pengolahan bagian tubuh udang. Kepala udang di oleh menjadi kitin, kitosan, petis, tepung kulit udang, dan terasi. Kaki udang diolah menjadi kaki udang krispi. Daging udang diolah menjadi beberapa produk beku seperti: peeled deveined, peeled undeveined, peeled tail on, peeled deveined tail on (PDTO) butterfly, PDTO stretched, peeled deveined tail on, ebi furai, skewer, produk lumatan, dan produk lainnya, Produk lumatan seperti: hakau udang, ekado, shrimp roll, dll, produk lainnya: udang kaleng, pastry udang, dll.

Pada produk ikan Bandeng, pohon industri dapat berupa pengolahan kolagen tulang bandeng, gelatin tulang bandeng, chitosan sisik bandeng, minyak ikan bandeng, abon bandeng, dll. Nelayan kecil juga melakukan hilirisasi produk perikanan seperti mengolah mangrove menjadi keripik, pengolahan daging kerang, kerupuk rajungan, kerupuk kepiting udang, pengolahan rumput laut, pengolahan ikan tongkol menjadi sambal, dll.

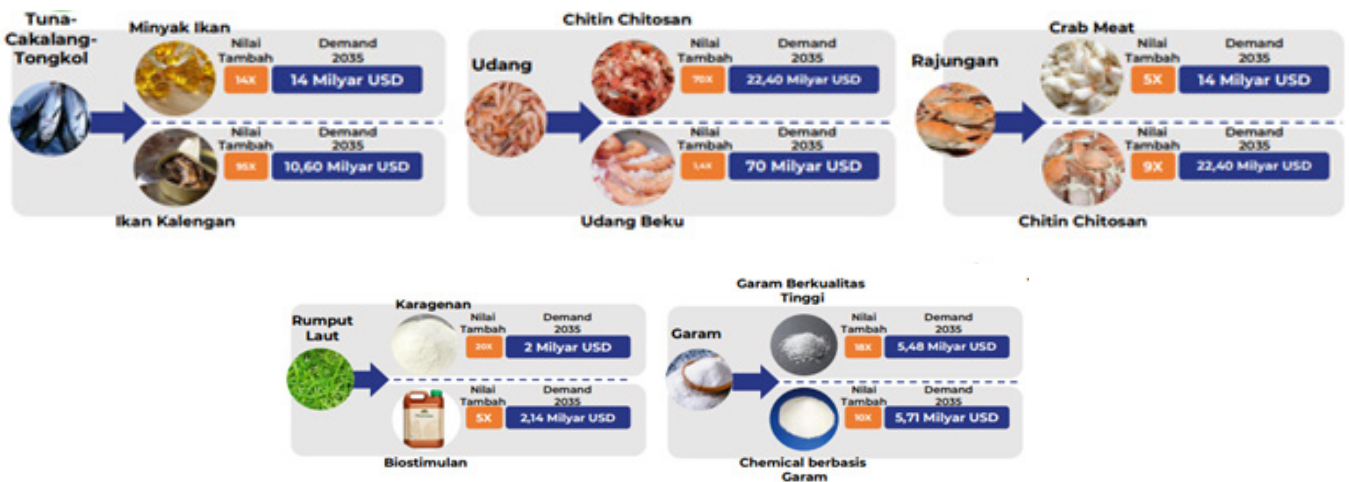
Pohon industri tuna dalam hilirisasi mencakup beberapa produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Bahan baku ikan TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol) dapat diolah menjadi produk beku seperti sashimi, fillet, dan steak, melalui proses trimming, freezing, dan penyimpanan di cold storage. Selain itu, ikan TCT dapat diolah menjadi ikan kalengan melalui proses pengalengan yang mencakup pre-cooking, seasoning, dan sterilisasi. Produk turunan lainnya adalah minyak ikan, yang dihasilkan dari ekstraksi lemak ikan, serta

tepung ikan dan gelatin-kolagen, yang dihasilkan melalui proses pengeringan dan hidrolisis.

Berdasarkan peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis (HIS) yang diluncurkan pada Desember 2023, kebijakan hilirisasi hingga 2045 akan difokuskan pada beberapa sektor seperti: timah, mineral, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta jalan hilirisasi bahan mentah dibuat mencakup 21 komoditas, empat jenis diantaranya dari sektor perikanan yang terdiri dari udang, ikan, rajungan, dan rumput laut. Roadmap ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan mendorong pendapatan perkapita penduduk, dengan memasukan potensi permintaan (demand) setiap komoditas yang dihitung hingga tahun 2035.

Pada komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol yang diolah menjadi minyak ikan, dapat menghasilkan nilai tambah 14 kali lipat, dengan demand sebesar 14 miliar USD. Jika diolah menjadi ikan kalengan akan memberikan nilai tambah sebesar 95 kali, dengan demand pada 2035 sebesar 10,60 miliar. Sementara pada udang jika diolah menjadi chitin chitosan memberikan nilai tambah 70 kali lipat, dengan demand sebesar 22,40 miliar USD. Jika diolah menjadi udang beku, nilai tambah yang dihasilkan menjadi berkurang, yaitu sebesar 1,4 kali dengan demand sebesar 70 miliar USD.

Sementara pada komoditas Rajungan, jika diolah menjadi crab meat memberikan nilai tambah 5 kali lipat dengan demand sebesar 14 miliar USD. Jika diolah menjadi chitin chitosan akan memberikan nilai tambah sebesar 9 kali dengan demand sebesar 22,40 miliar USD. Rumput laut juga menjanjikan potensi yang besar. Jika komoditas ini diolah menjadi karagenan, akan memberikan nilai tambah 20 kali lipat dengan demand sebesar 2 miliar USD. Jika diolah menjadi biostimulan akan memberikan nilai tambah sebesar 5 kali dengan demand sebesar 2,14 miliar USD.



Gambar 2. Alur Hilirisasi Sektor Perikanan dan Kelautan

Sumber: Kementerian Investasi/BPKM, 2022

Tantangan Hilirisasi Perikanan dan Kelautan

Hilirisasi perikanan memiliki potensi dan dampak positif bagi nelayan dan masyarakat, namun kondisi implementasinya saat ini masih belum optimal. Data Kementerian kelautan dan Perikanan (2019) menunjukkan, bahwa skala usaha pengolahan ikan di Indonesia didominasi oleh skala mikro dan kecil dengan jumlah 62.093 unit, sedangkan skala menengah-besar hanya berjumlah 773 unit. Pelaku usaha perikanan skala mikro-kecil didominasi oleh nelayan kecil, dengan jumlah mencapai 96 persen dari total 2,1 juta nelayan di Indonesia. Persentase usaha pengolahan ikan skala

kecil dan menengah sangat besar. Hal ini menjadi tantangan bagi hilirisasi perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha pengolahan ikan skala mikro, kecil, dan menengah. Permen KP No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan menyatakan usaha pengolahan ikan berskala mikro dan kecil merupakan usaha yang masih menggunakan teknologi manual, memiliki keterbatasan akses terhadap pendanaan dari perbankan, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih.

Tantangan selanjutnya adalah daya serap hasil produksi nelayan yang masih kecil. Survey Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia pada tahun 2021-2022 menyatakan bahwa 20-30 persen hasil produksi nelayan kecil tidak terserap pasar dan nelayan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan tersebut. Industri pengolahan sering kesulitan dalam mencari bahan baku. Penyebabnya adalah rantai pasok yang masih didominasi oleh tengkulak yang mengendalikan harga dan jumlah komoditas perikanan di pasar. Tantangan lain yang dihadapi adalah jauhnya jarak antara sumber

bahan baku dan industri pengolahan ikan. Contohnya sumber bahan baku perikanan ditangkap di daerah Timur, seperti daerah Maluku, Ambon, Sulawesi, namun industri pengolahan perikanan berada di pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan adanya peningkatan biaya tambahan dalam transportasi dan teknologi yang menjaga kualitas ikan tetap terjaga hingga sampai di tempat pengolahan.

Hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produktivitas pengolahan produk perikanan adalah kebutuhan akan permodalan yang besar. Permodalan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya kerja sama investasi, pembiayaan perbankan, lembaga keuangan non bank di bawah Kementerian, dan sebagainya.

Manfaat Hilirisasi Perikanan Bagi Nelayan

Strategi hilirisasi perikanan dan kelautan diharapkan akan memberi dampak penting bagi kelangsungan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Selain dapat menciptakan nilai tambah dari produk, namun juga berpotensi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di sektor ini. Kajian Bank Indonesia menyebutkan, dari sisi tenaga kerja, hilirisasi dalam bidang pangan (pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan) akan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, meskipun didominasi oleh tenaga kerja informal. Kontribusi sektor tersebut bisa menyerap tenaga kerja sebesar 30% (BI, 2023).

Namun, kunci penting dari kebijakan ini adalah perhatian yang besar pada dampaknya bagi para pelaku utamanya, yaitu nelayan dan pembudidaya. Hilirisasi perikanan dan kelautan diharapkan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan nelayan dan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan. Tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga persebaran kesejahteraan yang akan dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang banyak mengandalkan kehidupannya pada laut.

Untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi nelayan dan pembudidaya, diperlukan sejumlah prasyarat penting. Pertama, peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah produk perikanan dan kelautan skala mikro dan kecil agar memiliki kemampuan dalam implementasi hilirisasi. Usaha-usaha mikro dan kecil yang telah ada harus dikembangkan kapasitasnya melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan perijinan usaha. Kedua, penguatan lembaga ekonomi nelayan/pembudidaya dan masyarakat pesisir. Koperasi-koperasi perikanan dan kelautan dibenahi sehingga lebih sehat secara bisnis dan memiliki kemampuan untuk masuk pada bidang industri hilir. Koperasi dapat berperan menjadi konsolidator bahan baku dari nelayan untuk kebutuhan industri hilirisasi. Bersama dengan hal ini, akses terhadap permodalan, teknologi, dan pemasaran perlu dikembangkan menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik usaha sektor perikanan. Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif pajak, bantuan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur,

serta dukungan lainnya yang diperlukan. Keempat, Membangun skema kemitraan antara industri besar dengan nelayan dan atau usaha pengolahan ikan/budidaya skala mikro, kecil dan menengah sehingga saling menguntungkan dan berkelanjutan. misalnya, industri sedang dan besar dapat menjadi inkubator bisnis bagi industri kecil dan mikro sehingga transfer pengetahuan dapat dilakukan.

Pendekatan hilirisasi perikanan dan kelautan yang memiliki karakter pemberdayaan ini semata-mata untuk menghindari distribusi manfaat dari pengolahan sumber daya alam yang hanya dinikmati segelintir orang bermodal besar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tantangan besar yang dihadapi terkait kesejahteraan nelayan yang rendah. Oleh sebab itu, pemanfaatan anugerah Tuhan YME atas kelimpahan sumber daya perikanan dan kelautan harus dimaknai dalam kerangka menyusun suatu model ekonomi perikanan/kelautan yang berlandaskan prinsip kerakyatan. Dengan kata lain, hilirisasi perikanan dan kelautan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui pemanfaatan hasil perikanan dan kelautan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hilirisasi Perikanan: Peluang Generasi Muda

Dalam pelaksanaannya, hilirisasi perikanan yang menjadi program prioritas pemerintah membutuhkan sumber daya manusia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja pada sektor perikanan umumnya berusia lanjut atau di atas 40 tahun. Hanya sedikit generasi muda Indonesia yang memilih bekerja di sektor perikanan. Berdasarkan data BPS (2023), proporsi jumlah pemuda di sektor pertanian dan perikanan sebesar 19,20%. Artinya, jumlah generasi muda yang bekerja pada sektor tersebut masih di bawah 20%, jauh di bawah sektor manufaktur, jasa dan perdagangan, dengan porsi masing-masing sebesar 24,34% dan 56,46%. Rendahnya jumlah anak muda dalam sektor perikanan dan kelautan dikarenakan insentif yang didapatkan berupa pendapatan lebih rendah daripada orang dewasa. Pendapatan generasi muda pada sektor perikanan minus 18% dibandingkan dengan pendapatan orang dewasa (sumber: Katadata, 2021).

Melibatkan generasi muda dalam hilirisasi sektor perikanan dan kelautan sangat penting untuk masa depan sektor ini. Anak muda memiliki potensi untuk membawa inovasi dan peningkatan efisiensi dalam rantai nilai perikanan, yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. Terlebih lagi, partisipasi mereka dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi komunitas lokal dan nasional (Worldfish,2022)

Untuk memastikan keberhasilan hilirisasi sektor perikanan, penting untuk memberikan dukungan yang memadai bagi generasi muda, seperti akses terhadap pelatihan, teknologi, dan pendanaan. Tanpa dukungan ini, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan pekerja yang lebih berpengalaman atau untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini.

Persoalan lain terkait perlindungan pada pekerjaan nelayan yang perlu juga diperhatikan adalah perlindungan atas peralatan dan perlengkapan nelayan kecil dan tradisional untuk melaut. Artinya, selama ini skema asuransi ketenagakerjaan hanya melindungi nelayan dari risiko diri atau keselamatan nelayan ketika bekerja, namun tidak mencakup perlindungan atau skema asuransi terhadap sarana/ alat produksi yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, seperti kapal atau alat tangkap yang digunakan. Padahal, risiko kerusakan pada kapal atau alat tangkap akibat dari cuaca atau yang lainnya sangat besar dialami nelayan. Atau dalam kasus lain, ketika nelayan mengalami kecelakaan di laut yang disertai dengan kerusakan pada kapal dan alat tangkap, klaim hanya berlaku bagi manusianya saja, tidak alat produksinya. Padahal keduanya merupakan komponen yang sangat erat dengan pekerjaan seorang nelayan. Bisa dibayangkan jika seorang nelayan tangkap tidak memiliki kapal atau tidak memiliki alat tangkap, mereka akan kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Program asuransi pada alat produksi Nelayan,

bisa menjadi salah satu alternatif bantuan perlindungan pekerjaan Nelayan agar tepat sasaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang telah dielaborasi di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Implementasi hilirisasi perikanan dan kelautan dilakukan secara konsisten dan bersifat inklusif, berperspektif pemberdayaan, dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan.
2. Peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah produk perikanan dan kelautan skala mikro dan kecil agar memiliki kemampuan dalam implementasi hilirisasi industri perikanan. Usaha-usaha mikro dan kecil yang telah ada harus dikembangkan kapasitasnya melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan perijinan usaha.
3. Penguatan lembaga ekonomi nelayan/pembudidaya dan masyarakat pesisir. Koperasi-koperasi perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di pengolahan perikanan dan kelautan dibenahi sehingga lebih sehat secara bisnis dan memiliki kemampuan untuk masuk pada bidang industri hilir.
4. Membangun model kemitraan antara industri besar dengan usaha pengolahan ikan/budidaya skala mikro, kecil dan menengah sehingga saling menguntungkan dan berkelanjutan.

REFERENSI:

1. Bank Indonesia. 2023. Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023 (bi.go.id)
2. Badan Pusat Statistik. (2021). Data kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Indonesia. *Wakil Presiden Republik Indonesia*.
3. <https://www.wapresri.go.id/pimpin-rapat-kemiskinan-ekstrem-wapres-sebut-wilayah-pesisir-angkanya-lebih-tinggi-dan-lebih-kompleks/>
4. Christiana, Dominika Wara. Pairunan, Rocky. Kamili, Lutfi. Ibrahim, Juliandri. (2024, April 22) . Menuju Hilirisasi Sektor Perikanan Indonesia yang Kuat dan Berkelanjutan. WRI Indonesia. Menuju Hilirisasi Sektor Perikanan Indonesia yang Kuat dan Berkelanjutan | WRI Indonesia (wri-indonesia.org)
5. Kementerian Investasi/BKPM. 2022. Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Investasi Strategis (HIS). Jakarta
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Data Statistik Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) / Provinsi. Unit Pengolahan Ikan (UPI) (kkp.go.id)
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. Data statistik Ekspor-Impor. Eksim - Ekpor Impor (kkp.go.id)
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan. a. 2024. Toward Higher Performing Fishing. Jakarta
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. 2024. Peran Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Kebijakan Hilirisasi Perikanan Nasional. Jakarta
10. Rahardjo, Christoper Richie. (2024, Maret 20). Hilirisasi Perikanan untuk Perekonomian Nasional. Kompas. Hilirisasi Perikanan untuk

Perekonomian Nasional (kompas.com)

11. Trenggono, S. W. (2022, September 27). Pengelolaan ekosistem karbon biru dalam mitigasi perubahan iklim. *Indonesia Ocean Justice Initiative*.
12. <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/09/27/rekomendasi-t-20-tata-kelola-ekosistem-karbon-biru-dalam-mitigasi-perubahan-iklim/>
13. WorldFish. (2022). *A policymaker's guide to increasing youth engagement in aquaculture in Nigeria*.
14. WorldFish. (2023). *Supporting young people to enter food value chains can help reduce high levels of youth unemployment across sub-Saharan Africa*.

Ditulis oleh:

1. Rahmadanis
2. Widya Kartika
3. Dani Setiawan
4. Ahmad Furqon

Kontak:

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Jl. Mimosa 1 Blok ANo. 3 Buncit Indah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesia 12510.

Email: dpp@knti.or.id | dppknti@gmail.com



DPP KNTI



DPP KNTI Nelayan Indonesia



knti.or.id



[@dppknti](https://twitter.com/dppknti)



[@nelayan_bersatu](https://www.instagram.com/nelayan_bersatu)